

BAB I

PENDAHULUAN

Kita telah menjadi asing di tanah leluhur sendiri

(sajak sebotol bir-W.S. Rendra)

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang harusnya mempunyai potensi garam yang melimpah jika dilihat dari luas lautnya yang sekitar 5,8 juta km² atau 70 % dari luas Indonesia itu sendiri. Tapi pada kenyataannya hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi dilapangan, produksi garam di Indonesia masih dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan garam secara nasional, sebagaimana (Setiawan, 2014) mengatakan bahwasanya di Indonesia kebutuhan garam secara nasional pertahun diperkirakan sebanyak 2.200.000 ton dengan rincian 1.000.000 ton untuk kebutuhan konsumsi dan 1.200.000 ton untuk kebutuhan industri kimia dan industri pangan. Sedangkan kemampuan produksi nasional hanya mencapai kurang lebih 1.100.000 ton pertahunnya. Sehingga mau tidak mau masih banyak garam impor yang beredar di Indonesia guna memenuhi kebutuhan akan garam, khususnya dalam kebutuhan garam industri, yang menjadi pengguna garam terbanyak dibandingkan dengan kebutuhan untuk konsumsi, nyatanya garam tidak hanya dibutuhkan untuk dikonsumsi saja melainkan juga untuk dunia industri.

Bak gayung bersambut, guna untuk memenuhi kebutuhan garam secara nasional, maka menteri kelautan dan perikanan mencanangkan gerakan swasembada garam nasional melalui kegiatan produksi dan peningkatan kualitas garam rakyat dengan program memperdayakan masyarakat petani garam atau

lebih dikenal dengan istilah PUGAR. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR ini merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) yang mana dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K). Program ini memfokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petani garam karena Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada dasarnya merupakan salah satu solusi dari pemerintah guna memperbaiki mutu dan kualitas garam yang diproduksi oleh petani garam di Indonesia.

Permasalahan sekarang adalah terletak di kelompok tanigaram itu sendiri, sebagaimana hasil observasi awal peneliti yang menemukan bahwa sebagian besar kelompok pugarini mengeluh saat disuruh membuat proposal. Mereka merasa sangat kesulitan dalam membuat proposal pengajuan dana tersebut, karena menurut mereka membuat proposal adalah pekerjaan asing bagi mereka yang tiap hari selalu ada di lahan garam. Jika membuat proposal saja mereka tidak tahu, terus bagaimana bentuk pengelolaan dana pugaryang mereka peroleh ini, apalagi pada prinsipnya program ini menggunakan prinsip *bottom-up*, dimana petani sendiri yang melakukan semuanya dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Sehingga segala sesuatu bisa saja terjadi, mengingat tidak semua orang yang ada di sebuah organisasi selalu bertindak jujur, layaknya saudara kandung tak semua akan memiliki sifat yang baik, pasti ada salah satu yang berlaku berbeda atau bertindak nakal. Antonio (2002) dalam jurnalnya mengatakan bahwa apapun bentuk organisasi, tidaklah ada yang tidak rentan terhadap kecurangan dalam pengelolaannya. Ketika seseorang mengatakan bahwa kecurangan dalam pengelolaan sangat rentan, maka peneliti

disini juga tertarik untuk mengupas pengelolaan terkait dengan dana pugar tersebut.

Pengelolaan keuangan terhadap dana pugar tersebut juga perlu sebuah yang namanya akuntabilitas, karena setiap organisasi tidak luput dari yang namanya tuntutan dari pihak pemberi dana. Sebagaimana menurut (Wirayuni, 2015) yang mengatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan bagi setiap organisasi publik maupun non publik sangat diperlukan yang namanya akuntabilitas pengelolaan keuangan karena setiap organisasi mempunyai hubungan dengan pihak internal dan eksternal organisasi, bahwa tuntutan *stakeholder* membutuhkan akuntabilitas yang lebih transparan terhadap dana yang dikelola oleh organisasi tersebut.

Pengelolaan keuangan disebuah organisasi juga pernah diteliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Setiawan, 2013) yang meneliti tentang fenomena pengelolaan keuangan daerah pada sebuah SKPD yang menyatakan bahwa tidak seluruh realita diatas kertas laporan sama dengan realita kenyataannya di lapangan. Jadi pengelolaan keuangan daerah di SKPD ini menimbulkan wilayah penafsiran tentang adanya usaha indikasi *fraud* disana, bentuknya adalah “penyisihan dana” yang bersumber dari berbagai kegiatan SKPD yang dikelola menjadi sebuah “dana taktis”. Secara *form* diatas kertas klir pada angka di kisaran anggaran yang tertera di DPA, padahal secara substansi sebagian besar dana yang dibelanjakan tidak persis sama dengan yang tertera (*form over substance*). Fenomena global juga menetapkan organisasi pemerintah sebagai salah satu sasaran objek korban penyimpangan tertinggi. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi selaku kepala BPKP Bidang Investigasi mengatakan bahwa 80% kasus korupsi yang ditangani

BPKP bersama penegak hukum terjadi pada pengadaan barang/jasa, dan hampir 80% korupsi pengadaan barang/jasa tersebut terjadi di pemerintahan daerah. Lebih lanjut menyatakan bahwa korupsi pada APBN/APBD sudah dimulai dari perencanaan, lalu dilanjutkan pada proses pelelangan dan pelaksanaan. Pada proses perencanaan sering ditemukan misalnya HPS dibuat oleh rekan sendiri, dalam penemuan penyimpangan dalam bentuk rekayasa aplikasi/file komputernya. (situs resmi BPKP 2017).

Tidak hanya di dunia pemerintahan, penelitian tentang pengelolaan keuangan juga pernah dilakukan di dunia pendidikan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, 2015) yang meneliti dari lingkungan pendidikan mengenai fenomena pengelolaan keuangan di dalam salah satu UKM di suatu kampus sektor publik yang mendapatkan uang dari negara. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat sisi remang dalam pengelolaan keuangannya, yang terletak pada aset *missappropriation* dan *expense reimbursement schemes* yaitu dengan meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan, yang mana untuk memudahkan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan dana, ukm ini bahkan memiliki koleksi logo/lebel stempel dalam bentuk *softcopy* atas nama para pihak ketiga yang menjadi mitranya, bukti kwintansi dari pihak ketiga inilah bisa jadi mengikuti sikap yang ada di anggaran dan sikap yang ada di nota, walau secara faktual tidak sejumlah itu (lebih kecil).

Beberapa penelitian diatas membuktikan bahwasanya didalam setiap bentuk organisasi terdapat sisi lain yang muncul dari setiap bentuk pengelolaan keuangannya, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga bisa saja terjadi terhadap sebuah organisasi yang bahkan memiliki tingkat pendidikan yang

minim. Hal lain yang juga mendasari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya juga hanya meneliti pengelolaan keuangan di ruang lingkup pemerintahan dan sektor publik saja, jarang yang meneliti pengelolaan keuangan di sektor kecil seperti kelompok tani. Sehingga hal tersebut semakin membuat peneliti semakin penasaran terhadap bagaimana bentuk pengelolaan keuangan di sebuah kelompok kecil dengan tingkat pendidikan yang minim seperti kelompok tani tersebut. Maka dari rasa penasaran itulah peneliti tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Sisi Lain Pengelolaan Keuangan Kelompok Tani Garam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sama halnya dengan anak kecil yang rasa ingin tahunya tinggi terhadap segala hal yang ada di lingkungannya, maka berangkat dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu itu pulalah yang menjadi inisiatif awal peneliti ingin melakukan penelitian ini, yaitu dengan mencari tahu dan mengungkap bagaimana sisi lain dari praktik pengelolaan keuangan pugar oleh kelompok tani garam?

1.3 Tujuan Penelitian

Garis finis mungkin adalah tujuan akhir seorang pembalap atau pelari di perlombaan, atau sebuah gol adalah tujuan semua pemain sepak bola saat bertanding di lapangan. Maka penelitian ini juga mempunyai tujuan atau titik akhir yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sisi lain dari praktik pengelolaan keuangan oleh kelompok tani garam.

1.4 Manfaat Penelitian

Jika orang yang menanam bibit pohon obat berharap bibit tersebut tumbuh besar sehingga buahnya bisa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit orang

lain, maka begitu pula dengan penelitian ini yang diharapkan bisa memberi manfaat baik untuk penulis maupun untuk orang lain. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain: *pertama*, bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya, terutama tentang pengelolaan keuangan. *Kedua*, bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan pula agar dapat memberikan gambaran bahwa segala sesuatu itu butuh pertanggungjawaban.